

Pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan UMKM di Jawa Timur

Skill and effort training UMKM development in East Java

Helmi Prasetyo Yuwinanto

Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga
E-mail: helmy.prasetyo@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Di era globalisasi dan iklim persaingan usaha yang makin ketat, salah satu prasyarat atau modal yang dibutuhkan agar UMKM mampu tetap *survive* adalah kemampuan dan kualitas sumber daya yang memadai. Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi di lapangan adalah untuk mengetahui manfaat pelatihan ketrampilan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru di kalangan masyarakat di sekitar lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kegiatan sebagaimana dilaporkan pada dasarnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan manfaat dari program pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di sekitar lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT di Jawa Timur. Diakui sejumlah peserta pelatihan yang diwawancarai secara mendalam bahwa untuk mengembangkan usaha mandiri memang bukan hal yang mudah. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan menemukan ada banyak hal yang menjadi kendala atau penyebab sebagian besar peserta pelatihan tak juga kunjung mampu mengembangkan usaha yang mandiri. Untuk itu dibutuhkan strategi, kebijakan dan program yang benar-benar kontekstual dan efektif, yang tak kalah penting adalah bagaimana menggugah semua pihak untuk mau lebih peduli terhadap isu penanganan pengangguran, kemiskinan, dan pengembangan kewirausahaan.

Kata kunci: persaingan; usaha; wirausaha; strategi; pengangguran

Abstract

In the era of globalization and an increasingly fierce business competition climate, one of the prerequisites or capital required for MSMEs to be able to continue to survive is the ability and quality of adequate resources. The purpose of monitoring and evaluation in the field is to find out the benefits of skills training conducted by the Office of Cooperatives and UMKM in East Java Province in encouraging the growth of new entrepreneurs among the communities around the IHT environment and / or IHT raw material producing areas in 19 Regencies / Cities in East Java . The activity as reported is basically a monitoring and evaluation activity to find out the effectiveness and benefits of the skills training program for the community around the IHT environment and / or IHT raw material producing areas in East Java. A number of trainees who were interviewed deeply admitted that it was not easy to develop an independent business. The monitoring and evaluation carried out found that there were many things that became obstacles or causes that most of the training participants had not been able to develop an independent business. For this reason, strategies, policies and programs that are truly contextual and effective are needed, and equally important is how to inspire all parties to want to be more concerned with the issue of handling unemployment, poverty and entrepreneurship development.

Keywords: competition; business; entrepreneurship; strategy; unemployment

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi penopang ekonomi yang paling besar dalam perekonomian di Indonesia dibuktikan dengan adanya UMKM yang menjadi katup pengaman perekonomian Indonesia pada masa krisis dan menjadi penggerak dari pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Tedjasuksmana, 2014). UMKM menjadi sektor usaha terbesar kontribusinya terhadap pembangunan Negara serta mampu membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi para tenaga kerja, sehingga mampu meminimalisir angka pengangguran di Indonesia (Wijanarko & Susila, 2016). Beberapa kelemahan mendasar UMKM pada aspek pemasaran yakni rendahnya penyesuaian pasar, kurang kuat dalam persaingan yang kompleks, dan infrastruktur pemasaran yang kurang memadai (Suci, 2017). Penguasaan terhadap pasar merupakan prasyarat guna menumbuhkan daya saing UMKM dalam menghadapi mekanisme pasar yang semakin kompetitif dan kompleks (Sedyastuti, 2018). Maka dari itu, peran dari pemerintah guna mendorong pertumbuhan UMKM dalam memperluas akses pasar

melalui pemberian fasilitas teknologi berbasis web yang bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi serta branding bisnis di tingkat global (Roosdhani, Wibowo, & Widiastuti, 2012). Studi mengenai UMKM telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung dengan melakukan pendampingan dalam pembuatan media online berbentuk e-commerce guna mengembangkan UMKM di Tlogomas agar tetap eksis dan diharapkan mampu membantu menopang dan meningkatkan perekonomian warga Tlogomas (Irawan, 2020).

Di era globalisasi dan iklim persaingan usaha yang makin ketat, salah satu prasyarat atau modal yang dibutuhkan agar UMKM mampu tetap survive adalah kemampuan dan kualitas sumber daya yang memadai. Selama ini, banyak bukti memperlihatkan bahwa kualitas para pelaku UMKM di tanah air ini, tak terkecuali di Provinsi Jawa Timur umumnya masih belum bisa diandalkan, sehingga ketika harus memenuhi tuntutan standarisasi dan kualitas produk sebagaimana dibutuhkan pasar atau konsumen, tidak semua pelaku UMKM bisa memenuhinya. Di berbagai daerah, para pelaku UMKM umumnya belum atau tidak banyak memiliki modal ekonomi mau pun modal sosial yang memadai. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi produk dan keterampilan yang dapat diandalkan untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas dan terstandarisasi, seringkali masih belum banyak dikuasai pelaku UMKM. Alih-alih mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional mau pun pasar nasional, dalam kenyataan masih banyak pelaku UMKM yang hanya bermodal keterampilan yang bersifat tradisional, konvensional dan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan bagi para pelaku UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama ini telah menggelar kegiatan pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kota/kabupaten. Tujuan pemberian ilmu, motivasi dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat di sekitar daerah penghasil tembakau ini, selain untuk memberikan bekal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan UMKM, juga sekaligus untuk menumbuhkan etos kewirausahaan dan sekaligus menurunkan jumlah pengangguran dan penduduk miskin.

Di Provinsi Jawa Timur, salah satu program pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM di tahun 2014 adalah memberikan fasilitasi pemberian ilmu, motivasi dan keterampilan bagi masyarakat di sekitar lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT. Pelatihan yang dilakukan terbagi menjadi 4 jenis pelatihan keterampilan untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat sebagai modal sosial mereka untuk mengembangkan usaha-usaha baru yang prospektif atau dapat bermanfaat untuk mendorong makin berkembangnya ushaa-usaha lama yang telah mereka tekuni sebelumnya.

Di lingkungan masyarakat di sekitar daerah penghasil tembakau, disadari bahwa salah satu persoalan yang timbul adalah adanya sebagian masyarakat yang masih berkulat pada kemiskinan dan bahkan tidak sedikit pula yang tidak memiliki kegiatan usaha alias masih belum bekerja. Dengan memberikan kegiatan pelatihan keterampilan seperti dipaparkan di atas, diharapkan bukan hanya bermanfaat untuk mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi kerakyatan yang mandiri, tetapi yang tak kalah penting dapat menjadi media untuk membantu mempercepat upaya penanganan kemiskinan dan pengangguran melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 bagi masyarakat di sekitar daerah penghasil industri tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri tembakau, terbukti bermanfaat dan fungsional dalam mendorong perkembangan usaha dan etos kewirausahaan masyarakat, LPPM Universitas Airlangga telah melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan.

Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi di lapangan adalah untuk mengetahui manfaat pelatihan keterampilan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam mendorong

tumbuhnya wirausaha baru di kalangan masyarakat di sekitar lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT di 19 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Metode Penelitian

Kegiatan sebagaimana dilaporkan pada dasarnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan manfaat dari program pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di sekitar lingkungan IHT dan/atau daerah penghasil bahan baku IHT di Jawa Timur. Lokasi monitoring dan evaluasi, secara purposive ditetapkan di 19 daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini telah berhasil diwawancarai sebanyak 3.627 peserta.

Hasil dan Pembahasan

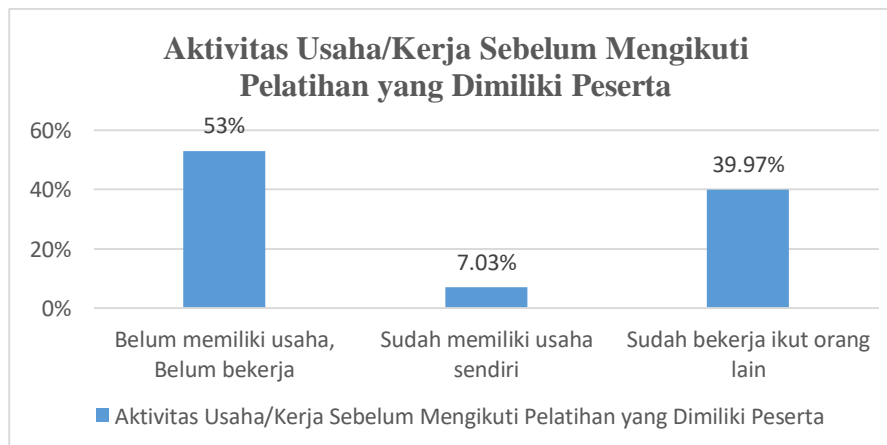
Aktivitas Usaha Pasca Pelatihan Ketrampilan

Di atas kertas, tujuan dilaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di lingkungan sekitar industri tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri tembakau sesungguhnya selain untuk meningkatkan kemampuan teknis peserta, juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kewirausahaan baru di kalangan peserta, sehingga mereka dapat melahirkan usaha-usaha kreatif yang mandiri dan berkelanjutan. Tetapi, untuk mewujudkan tujuan ideal tersebut harus diakui bukanlah hal yang mudah. Jangankan berbicara peserta pelatihan yang hanya ikut kegiatan pelatihan dalam hitungan hari yang tidak lebih dari 1 minggu, bahkan di kalangan sarjana yang telah menempuh kuliah selama 4 tahun lebih pun seringkali untuk dapat mengembangkan usaha mandiri ternyata bukan hal yang gampang.

Studi yang dilakukan Suyanto dan Ariadi (2014) di kalangan pengangguran terdidik --yakni para sarjana yang masih menganggur-- menemukan kendati para sarjana ekonomi yang diteliti merupakan lulusan PT terkenal dan memiliki IPK yang relatif tinggi (di atas 3), tetapi mereka umumnya belum memiliki kemampuan dan ambisi untuk mengembangkan usaha mandiri. Berbagai teori dan pengalaman selama proses pembelajaran di bangku kuliah, umumnya dinilai tidak memberikan manfaat langsung untuk mendukung upaya pengembangan usaha mandiri. Dalam banyak kasus, para sarjana lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekali pun ternyata lebih suka bekerja ikut orang lain. Kendala yang acapkali dihadapi para sarjana yang masih menganggur ini, adalah keterbatasan modal dan jumlah kompetitor yang terlalu banyak. Di era iklim persaingan usaha yang makin ketat, diakui sulit bagi mereka untuk dapat mengembangkan usaha mandiri, terutama ketika mereka tidak memiliki dukungan modal yang cukup dan akses pada pasar yang bisa diandalkan. Sebagaimana tertera pada grafik 1.

Grafik 1.

Aktivitas Usaha/Kerja Sebelum Mengikuti Pelatihan yang Dimiliki Peserta



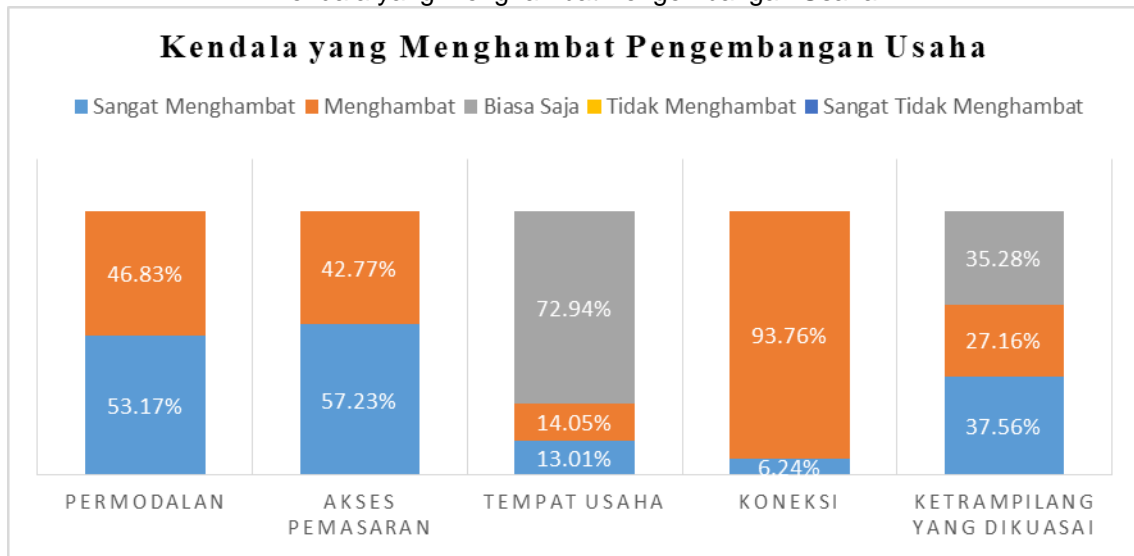
Sumber: Data primer

Jadi, kalau di kalangan sarjana yang terdidik saja upaya untuk mengembangkan usaha yang mandiri masih sulit dilakukan, sesungguhnya wajar jika di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang hanya dilatih dalam hitungan hari kemudian hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dari 3.627 peserta pelatihan yang diwawancarai, kegiatan ini menemukan bahwa hingga setahun kemudian sebagian besar peserta (53%) umumnya masih tetap menganggur, belum bekerja, dan belum pula memiliki usaha mandiri. Sebanyak 39,97% peserta pelatihan saat dimonitor mengaku sudah bekerja ikut orang lain, dan hanya 7,03% atau 255 peserta yang mengaku sudah memiliki usaha sendiri yang mandiri. Dari 7,06 atau 255 peserta yang memiliki usaha sendiri ini, sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan jumlah tenaga kerja di bawah 5 orang atau termasuk mereka tidak memiliki tenaga kerja tambahan selain dirinya sendiri (60,78%), atau hanya sekitar 6-10 orang pekerja (32,16%).

Di tengah iklim perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, diakui sejumlah peserta pelatihan yang diwawancarai secara mendalam bahwa untuk mengembangkan usaha mandiri memang bukan hal yang mudah. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan menemukan ada banyak hal yang menjadi kendala atau penyebab sebagian besar peserta pelatihan tak juga kunjung mampu mengembangkan usaha yang mandiri. Kendala utama yang dinilai sebagian besar (93,76%) peserta pelatihan adalah karena mereka tidak memiliki koneksi yang memadai.

Tanpa didukung kenalan, patron atau pihak-pihak yang memiliki "kekuasaan" atau "pengaruh lebih", menurut sebagian besar peserta pelatihan sulit mereka diharapkan dapat mengembangkan sebuah usaha yang mandiri dan prospektif. Selain itu juga berbagai kendala seringkali menghambat upaya pengembangan usaha mandiri. Sebagaimana tertera pada grafik 2.

Grafik 2.
Kendala yang Menghambat Pengembangan Usaha



Sumber: Data primer

Selain koneksi, faktor lain yang seringkali sangat menghambat upaya pengembangan usaha mandiri di kalangan peserta pelatihan adalah akses pada pasar yang terbatas (57,23%) dan keterbatasan modal usaha yang dimiliki (53,17%). Menurut para peserta pelatihan, untuk melakukan aktivitas produksi dan menghasilkan produk-produk tertentu sebetulnya hal itu tidak akan terlalu menjadi masalah. Asalkan ada bahan baku dan modal, mereka niscaya akan bisa menghasilkan produk tertentu untuk dijual ke pasar. Tetapi, masalahnya kemudian adalah bagaimana memastikan agar produk yang mereka hasilkan dapat terserap pasar? Ketika akses pada pasar rendah atau sama sekali buntu karena dikuasai para tengkulak dan pedagang perantara, maka tidak banyak hal yang bisa dilakukan para peserta pelatihan untuk mengembangkan usaha mandiri yang benar-benar menguntungkan.

Tidak dimilikinya modal yang cukup, menurut sebagian besar peserta pelatihan juga kerap menjadi faktor penghambat bagi mereka dalam mengembangkan sebuah usaha. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin para peserta pelatihan dapat mengembangkan sebuah usaha jika modal tidak dimiliki, dan akses mereka terhadap sumber-sumber permodalan juga rendah. Tanpa adanya pinjaman lunak dan hibah dari pihak ketiga, besar kemungkinan peluang para peserta pelatihan untuk menjajagi pengembangan usaha tertentu akan menemui jalan buntu.

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan juga menemukan, hal lain yang seringkali menjadi kendala bagi peserta pelatihan untuk mengembangkan usaha adalah karena tidak menguasai ketrampilan yang mendukung. Sebanyak 37,56% peserta pelatihan mengaku sangat kesulitan untuk mengembangkan sebuah usaha karena mereka tidak memiliki ketrampilan yang mendukung hal itu. Walau pun mereka telah mengikuti pelatihan ketrampilan yang ditawarkan Dinas Koperasi dan UMKM, tetapi karena usaha yang ingin mereka kembangkan berbeda, maka pada akhirnya yang terjadi adalah keterbatasan dan bahkan tertutupnya peluang mereka melakukan hal itu.

Dari sekian banyak peserta pelatihan yang mengaku saat ini memiliki usaha mandiri atau tengah bekerja pada orang lain, hanya 11,73% yang menyatakan bahwa pekerjaan yang ditekuni saat ini ada hubungannya dengan pelatihan yang pernah mereka ikuti. Sebagian besar peserta (88,27%) mengaku bahwa usaha atau kerja yang mereka tekuni saat ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelatihan yang pernah mereka ikuti.

Kalau berbicara keinginan, sebetulnya sebagian besar peserta pelatihan mengaku memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha yang ada hubungannya dengan kegiatan pelatihan yang pernah mereka ikuti. Sebanyak 68,98% peserta menyatakan ingin mengembangkan kegiatan usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pelatihan yang mereka ikuti, dan hanya 31,02% peserta yang menyatakan

tidak ingin mengembangkan usaha yang ada kaitannya dengan pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Di kalangan peserta yang tidak ingin mengembangkan usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pelatihan yang mereka ikuti, alasan yang mereka kemukakan sebagian adalah karena tidak memiliki modal untuk hal itu (20%). Sementara itu, sebagian besar peserta yang lain menyatakan alasan mereka tidak ingin adakah karena sudah memiliki usaha atau pekerjaan lain (39,29%), tidak optimis dengan prospek perkembangannya (35,56%), dan sisanya sebanyak 5,15% peserta menyatakan tidak berminat mengembangkan pekerjaan atau usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pelatihan yang pernah mereka ikuti karena takut rugi.

Sementara itu, di kalangan peserta pelatihan yang ingin mengembangkan usaha yang ada kaitannya dengan pelatihan yang mereka ikuti, dukungan yang mereka butuhkan, terutama adalah modal dan bantuan akses pada pasar. Sebanyak 47,96% peserta menyatakan membutuhkan dukungan atau bantuan modal usaha untuk bekal mereka mengembangkan usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pelatihan yang mereka pernah ikuti. Dari 2.502 peserta pelatihan yang mengaku ingin mengembangkan usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pelatihan yang mereka ikuti, sebanyak 43,96% peserta menyatakan membutuhkan dukungan akses ke pasar, dan 3,41% peserta yang lain menyatakan membutuhkan pendampingan serta kesempatan magang. Sebanyak 3,39% peserta mengaku membutuhkan pelatihan tambahan agar mereka benar-benar menguasai materi pelatihan dan dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan sebuah usaha alternatif yang fungsional bagi kehidupan ekonomi keluarganya.

Agenda ke depan

Sesungguhnya ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mempercepat upaya penanganan kemiskinan, mengeliminasi perkembangan jumlah pengangguran yang makin mencemaskan, serta upaya untuk mendorong perkembangan wirausaha baru di kalangan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Selain dibutuhkan strategi, kebijakan dan program yang benar-benar kontekstual dan efektif, yang tak kalah penting adalah bagaimana menggugah semua pihak untuk mau lebih peduli terhadap isu penanganan pengangguran, kemiskinan, dan pengembangan kewirausahaan.

Upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan, meski pun disadari merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana pun ragam persoalan yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangatlah banyak, semua diklaim tergolong persoalan prioritas, dan bahkan secara politis tidak sedikit persoalan dadakan muncul dan menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah.

Kita semua tentu telah memahami bahwa efek domino situasi krisis dan kenaikan harga BBM yang beruntun bukan saja telah menimbulkan proses pendalaman dan perluasan kemiskinan serta meningkatnya jumlah pengangguran, tetapi juga menyebabkan munculnya desakan yang sangat kuat kepada pemerintah untuk mengembangkan program yang sifatnya darurat-penyelamatan untuk mencegah agar masyarakat tidak makin terpuruk karena kemiskinan atau kehilangan pekerjaan, sekaligus menjaga agar imbasnya tidak melahirkan gejolak dan resistensi masyarakat yang dapat merugikan status quo. Tidak sedikit dana terpaksa harus dialokasikan dan dikucurkan untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak kolaps, dan bahkan dalam batas-batas tertentu terpaksa menyebabkan pos-pos dan perhatian yang seharusnya juga diberikan kepada isu-isu pembangunan yang lain, termasuk isu penanganan pengangguran usia muda, menjadi agak terbengkalai.

Di luar arti penting komitmen dan dukungan dana, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan adalah persoalan substansi program yang digulirkan dan strategi apa yang seharusnya yang dikembangkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program. Secara garis besar, beberapa strategi prioritas yang

selayaknya dikembangkan untuk menjamin efektivitas kegiatan pelatihan ketrampilan dalam rangka mendorong pengembangan kewirausahaan baru di tahun-tahun mendatang adalah:

Pertama, upaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru, selain membutuhkan pelatihan ketrampilan teknis, yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun konstruksi dan pemahaman peserta tentang aspek-aspek sosiologi ekonomi dalam pemasaran produk. Para peserta pelatihan perlu memahami bahwa yang disebut konsumen dan bagaimana perilaku konsumsi yang mereka kembangkan sesungguhnya tidak selalu rasional-kalkulatif, tetapi acapkali justru banyak dipengaruhi oleh perkembangan gaya hidup (*life style*). Di era masyarakat postmodern seperti sekarang ini, perlu dipahami bahwa konsumen membeli dan mengkonsumsi sebuah produk tidak lagi hanya ditentukan oleh kebutuhan akan "fungsi pertama" produk atau kegunaan produk, melainkan juga --dan bahkan lebih kuat-- ditentukan oleh kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap apa yang disebut Theodore Adorno (1972) sebagai ersatz —yakni “nilai pakai kedua” dari sebuah produk yang ditawarkan. Artinya, ketika seseorang membeli sebuah produk --katakanlah sebuah tas--, maka yang diberi bukan hanya fungsi tas untuk menempatkan barang-barang tertentu seperti dompet, kacamata, dan lain-lain, tetapi yang lebih penting justru adalah kebutuhan dan keinginan konsumen akan prestise atau nilai gengsi dari tas itu, sehingga jangan heran jika ada orang yang bersedia membayar puluhan atau bahkan ratusan juta untuk membeli tas dengan merk-merk tertentu yang terkenal.

Kedua, upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, apa pun bentuknya, seyogianya tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat meritokratis. Dalam arti, yang dibutuhkan peserta pelatihan sesungguhnya bukan hanya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, melakukan berbagai program pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha kepada para pencari kerja, tetapi bagaimana memastikan mereka dapat bersaing dalam struktur iklim usaha yang sangat kompetitif dan tidak ramah. Seperti dikatakan Vic George dan Paul Wilding (1992), kebijakan yang berorientasi pertumbuhan dan hanya mengutamakan kesamaan kesempatan berkompetisi —yang secara konseptual berlawanan dengan pendekatan pembangunan yang berdimensi kerakyatan— semakin kehilangan daya tariknya karena telah terkumpul banyak bukti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang egaliter ternyata telah membuahkan hasil yang tidak egaliter. Kedua ahli ini juga menyatakan bahwa kebijakan yang terlalu menekankan unsur persamaan kesempatan saja cenderung bersifat meritokratis. Penekanan lebih ditujukan pada persamaan dalam bersaing daripada persamaan dalam hasil yang dicapai. Jadi, semacam turunan langsung dari individualisme yang dibalut dan dimanusiawikan melalui usaha-usaha negara kesejahteraan atau merupakan hasil konstelasi nilai-nilai yang mencerminkan kompromi antara nilai *laissez-faire* dan persamaan.

Ketiga, upaya pengembangan kewirausahaan dan usaha mandiri bagi pengangguran, baik lewat bantuan modal usaha berbunga murah, melakukan proses pendampingan, pengembangan ketrampilan alternatif, maupun lewat program pengembangan usaha yang lebih berorientasi pada pengembangan diversifikasi produk dan diversifikasi usaha daripada sekadar membesarkan usaha tunggal yang rawan kolaps.

Kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai upaya pemberdayaan UMKM yang banyak dipraktikkan selama ini adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil secara linier, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Selama ini, banyak bukti menunjukkan, paket-paket program pengembangan usaha kecil mandiri di Indonesia memang lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi daripada bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan. Paket bantuan permodalan dan bantuan teknologi yang diberikan pemerintah meski dimaksudkan untuk mendorong pendapatan para pelaku ekonomi kerakyatan. Namun, sangat kelihatan bahwa di balik itu maksud yang sesungguhnya adalah untuk meningkatkan produksi demi kepentingan ekspor dan peraihan devisa.

Bahkan, yang lebih tragis sering terjadi tindakan yang dilakukan pemerintah atas nama pembangunan bukan memberikan manfaat yang nyata bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, melainkan

justro berdampak menggerogoti kemampuan swadaya lokal. Penetrasi teknologi dan bantuan modal usaha ke berbagai wilayah dan komunitas masyarakat desa, misalnya benar di satu sisi telah berhasil mendongkrak angka-angka produksi dan mengantarkan Indonesia ke tahap swasembada dalam berbagai sektor produksi. Namun, tak bisa diingkari bahwa kesenjangan di saat yang bersamaan justru makin melebar dan potensi masyarakat banyak yang tersungkur digerus modernisasi.

Dalam hal ini, yang perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya tidak selalu harus dengan cara memacu perkembangan dan semata hanya berusaha meningkatkan volume atau jumlah produksi sektor usaha kecil tersebut. Mungkin benar, bahwa dengan cara meningkatkan omzet atau jumlah produksi otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi, apakah peningkatan produksi selalu dapat diikuti oleh pemekaran pangsa pasar? Studi yang dilakukan Suyanto (2013) menemukan bahwa salah satu kelemahan usaha berskala kecil adalah keterbatasan situasi pasar. Jumlah unit kerja sektor ini yang cenderung besar dan satu sama lain saling berkompetisi secara ketat acapkali menyulitkan satu dengan yang lain untuk dapat memperluas pangsa pasar mereka.

Untuk meningkatkan kadar keberdayaan dan sekaligus mencegah resiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari usaha mandiri yang ditekuni para peserta pelatihan ketrampilan alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beraneka-ragam atau satu dengan yang lain saling berbeda. Pengalaman yang sudah-sudah membuktikan bahwa sebuah keluarga yang semata-mata hanya menggantungkan kepada satu mata pencaharian —di mana suami, istri dan anak semua bekerja di sektor yang sama— umumnya secara sosial-ekonomi lebih rapuh karena jika suatu saat harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami kerugian yang sama. Ini berbeda jika dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Keluarga yang mengembangkan pola diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan kadar keberdayaan dan sekaligus mencegah resiko kemungkinan terjadinya kegagalan total dari usaha mandiri yang ditekuni para peserta pelatihan ketrampilan alangkah baiknya jika di saat yang bersamaan tiap-tiap anggota keluarga yang termasuk tenaga kerja produktif didorong untuk mengembangkan kegiatan usaha yang beraneka-ragam atau satu dengan yang lain saling berbeda. Pengalaman yang sudah-sudah membuktikan bahwa sebuah keluarga yang semata-mata hanya menggantungkan kepada satu mata pencaharian —di mana suami, istri dan anak semua bekerja di sektor yang sama— umumnya secara sosial-ekonomi lebih rapuh karena jika suatu saat harga komoditi yang mereka produksi anjlok, maka itu berarti semua anggota keluarga akan kehilangan dan mengalami kerugian yang sama. Ini berbeda jika dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Keluarga yang mengembangkan pola diversifikasi usaha, terbukti dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu lebih berdaya dan kenyal terhadap tekanan kebutuhan ekonomi.

Simpulan

Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan menemukan banyak hal yang menjadi kendala atau penyebab sebagian besar peserta pelatihan tak juga kunjung mampu mengembangkan usaha yang mandiri. Tanpa didukung kenalan, patron atau pihak-pihak yang memiliki "kekuasaan" atau "pengaruh lebih", menurut sebagian besar peserta pelatihan sulit mereka diharapkan dapat mengembangkan sebuah usaha yang mandiri dan prospektif. Kegiatan pelatihan pun belum sepenuhnya mampu membuat usaha mereka menjadi lebih baik.

Secara garis besar, beberapa strategi prioritas yang selayaknya dikembangkan untuk menjamin efektivitas kegiatan pelatihan ketrampilan dalam rangka mendorong pengembangan kewirausahaan baru di tahun-tahun mendatang adalah, Pertama, upaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha baru,

selain membutuhkan pelatihan ketrampilan teknis, yang tak kalah penting adalah bagaimana membangun konstruksi dan pemahaman peserta tentang aspek-aspek sosiologi ekonomi dalam pemasaran produk. Kedua, upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, apa pun bentuknya, seyogianya tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat meritokrasi. Ketiga, upaya pengembangan kewirausahaan dan usaha mandiri bagi pengangguran, baik lewat bantuan modal usaha berbunga murah, melakukan proses pendampingan, pengembangan ketrampilan alternatif, maupun lewat program pengembangan usaha yang lebih berorientasi pada pengembangan diversifikasi produk dan diversifikasi usaha daripada sekadar membesarkan usaha tunggal yang rawan kolaps. Keempat, untuk meningkatkan luas cakupan dan dukungan yang lebih besar dari seluruh stakeholder terkait dalam upaya penanganan pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan, ada baiknya jika dikembangkan kerjasama dan program kemitraan dengan berbagai pihak.

Daftar Pustaka

- Adorno TW & Max H (1972) *Dialektika Pencerahan*. New York: The Seabury Press.
- George B & Paul W (1992) *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Irawan PLT, Kestrilia RP, & Melany (2020) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Implementasi ECommerce di Kelurahan Tlogomas. *Jurnal SOLMA* 9(1):33-44. Doi: <http://dx.doi.org/10.29405/solma.v9i1.4347>.
- Roosdhani MR, Wibowo PA, & Widiastuti A (2012) Analisis Tingkat penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi pada Usaha Kecil Menengah di Kab. Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 9(2):89–104.
- Sedyastuti K (2018) Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia* 2(1):117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Suci YR (2017) Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6(1):51–58.
- Suyanto B & Septi A (2014) *Upaya Pengembangan Usaha Mandiri di Kalangan Pengangguran Terdidik di Jawa Timur*. Surabaya: Laporan Akhir Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Baru Tahap II.
- Suyanto B (2013) *Sosiologi Ekonomi, Kapitalisme & Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tedjasuksmana B (2014) *Potret UMKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Di NCFB ke-7 dan Kolokium Doktoral.
- Wijanarko A & Susila I (2016) *Faktor Kunci Keberhasilan UMKM Kreatif*. Perubahan Kultur Dan Sinergitas Bisnis. Sidoarjo: FEB Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.